



RENJA

TAHUN 2026



**KECAMATAN
BANYUMAS**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Rencana Pembangunan Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana di tingkat Perangkat Daerah mulai dari perencanaan jangka menengah lima tahunan yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan perencanaan jangka pendek periode satu tahun yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RENJA. Sedangkan RENJA dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Selanjutnya, sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2026. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RENJA yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rankhir) Renja Perangkat Daerah yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Program, Kegiatan, Lokasi, Dan Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RENJA.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2026, merupakan rencana Pembangunan tahunan yang disusun untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil dan Sejahtera (PAS) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas selama periode Renstra Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang Berkualitas”.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banyumas Kabupate Banyumas Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
 24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2026 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2026 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas selama periode Renja Tahun 2026.
3. Sebagai pedoman Kecamatan Banyumas dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang menagtur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan ($n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas fungsi Perangkat Daerah dan dampaknya terhadap capaian program, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, serta formulasi isu-isu penting berupa

rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan terhadap perbedaan dengan Rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Bagian ini memuat uraian mengenai berbagai bentuk inovasi yang telah, sedang, atau direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bagian ini memuat perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan secara detail Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Banyumas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaandalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Banyumas selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2026. Berikut tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Banyumas dan Pencapaian Renstra Kecamatan Banyumas sd Tahun 2024 kabupaten Banyumas (Tabel T.C 29) :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kecamatan Banyumas

SUB OPD : KECAMATAN BANYUMAS

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Kecamatan Banyumas									
7				UNSUR KEWILAYAHAN									
7	01			KECAMATAN									
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100	N/A	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	N/A	4	4	100	4	4	33.33
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	N/A	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100	N/A	100	100	100	100	100	100

7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	N/A	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	100	N/A	100	100	100	100	100	100
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	N/A	100	100	100	100	100	100
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	N/A	84	89	104.71	84	89	103.49
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	N/A	100	100	100	100	100	100
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	N/A	100	100	100	100	100	100
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100	N/A	100	100	100	100	100	100
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100	N/A	100	100	100	100	100	100
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100	N/A	100	100	100	100	100	100
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	100	N/A	100	100	100	100	100	100

7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100	N/A	100	100	100	100	100	100	100
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes tepat waktu	100	N/A	100	100	100	100	100	100	100
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100	N/A	100	100	100	100	100	100	100

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas

NO	Indikator Tujuan, Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi Tahun 2026	Catatan Analisis
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	Presentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100	100	100	100	100	100	
2	Presentase capaian kinerja Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan	84,05	84,05	84,05	80,85	N/A	84,05	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya hasil pembinaan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- b. Belum optimalnya peran kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- c. Belum optimalnya peran kecamatan dalam ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi masyarakat;
- e. Kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana kantor kecamatan, sistem teknologi yang semakin modern serta kurangnya dukungan dalam mencapai terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.

Rancangan awal RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal Renja Bappedalitbang dapat dilihat pada lampiran tabel T-C.31.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kecamatan Banyumas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. BANYUMAS			2.730.302.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. BANYUMAS			2.945.227.000,00
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. BANYUMAS	<i>Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 dokumen	12.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. BANYUMAS	<i>Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 dokumen	12.000.000,00
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. BANYUMAS	<i>Persentase pengelolaan administrasi keuangan</i>	100 %	1.921.450.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. BANYUMAS	<i>Persentase pengelolaan administrasi keuangan</i>	100 %	2.168.618.618,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. BANYUMAS	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum</i>	100 %	172.052.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. BANYUMAS	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum</i>	100 %	166.921.902,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. BANYUMAS	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	100 %	95.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. BANYUMAS	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	100 %	59.250.000,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. BANYUMAS	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	443.500.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. BANYUMAS	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	444.496.480,00

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. BANYUMAS	Persentase pemeliharaan barang milik daerah urusan Pemerintahan Daaerah	100 %	86.300.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. BANYUMAS	Persentase pemeliharaan barang milik daerah urusan Pemerintahan Daaerah	100 %	93.940.000,00
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. BANYUMAS			32.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. BANYUMAS			32.000.000,00
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. BANYUMAS	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100 %	10.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. BANYUMAS	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100 %	10.000.000,00
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. BANYUMAS	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %	22.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. BANYUMAS	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %	22.000.000,00
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. BANYUMAS			45.500.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. BANYUMAS			38.225.000,00
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. BANYUMAS	Persentase kegiatan pemberdayaan desa Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan	12 Dokumen	45.500.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. BANYUMAS	Persentase kegiatan pemberdayaan desa Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan	100 % 100 %	38.225.000,00

13	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. BANYUMAS			47.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. BANYUMAS			47.000.000,00
14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. BANYUMAS	<i>Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan</i>	100 %	47.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. BANYUMAS	<i>Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan</i>	100 %	47.000.000,00
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. BANYUMAS			13.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. BANYUMAS			13.000.000,00
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. BANYUMAS	<i>Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan</i>	100 %	13.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. BANYUMAS	<i>Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan</i>	100 %	13.000.000,00
17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. BANYUMAS			22.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. BANYUMAS			14.350.000,00
18	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. BANYUMAS	<i>Presentase Desa yang mendapatkan pendampingan</i>	100 %	22.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. BANYUMAS	<i>Presentase Desa yang mendapatkan pendampingan</i>	100 %	14.350.000,00

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kecamatan Banyumas tidak menambah usulan program dan kegiatan berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis Perangkat Daerah di luar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappedalitbang sebagai Perangkat Daerah Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan Perangkat Daerah baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Desa.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2026 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

RKP Tahun 2026 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMN 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 didasarkan atas Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2025-2029, yaitu *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi pembangunan/ Asta Cita, yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional. Prioritas Nasional tersebut antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 disusun pentahapan fokus kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pada tahun 2026 fokus diarahkan pada kebijakan “Meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional”. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kebijakan tersebut antara lain:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem agroforestry berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (large scale food fortification/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste).

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 juga diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah yaitu:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis.
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan.
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Rencana pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: “*Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.*” Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diarahkan untuk *“Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”*. Secara keseluruhan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diprioritaskan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu secara inklusif
- b. Meningkatkan budaya literasi, pengelolaan olahraga dan kebudayaan Banyumas untuk penguatan Karakter Sumber Daya Manusia yang unggul
- c. Meningkatkan pembangunan keluarga yang memperhatikan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, kesetaraan gender, pemenuhan hak dan perlindungan masyarakat secara inklusif, serta peningkatan peran aktif pemuda
- d. Meningkatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pelaku ekonomi
- e. Penguatan Implementasi regulasi yang hijau dan adaptif
- f. Meningkatkan pengembangan produk potensial dan produk unggulan serta penguatan sarana dan prasarana pendukung
- g. Meningkatkan penanganan kemiskinan dan pelayanan perlindungan sosial secara terintegrasi
- h. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan penurunan pengangguran
- i. Memperkuat Ketahanan Pangan Lokal dengan peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta pengembangan pangan lokal
- j. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah dengan infrastruktur dan konektivitas serta instrumen pendukung yang memadai dan berkelanjutan
- k. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi mendukung Reformasi Birokrasi Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah secara berkelanjutan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Menindaklanjuti hasil evaluasi perencanaan, Kecamatan Banyumas telah melaksanakan review terhadap sasaran dan retargeting terhadap target indikator yang telah tercapai pada periode sebelumnya.

Penetapan tujuan dan sasaran dilakukan untuk merespons isu-isu strategis yang telah diidentifikasi. **Kecamatan Banyumas**, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bertanggung jawab membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan Pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan di Kabupaten Banyumas, membantu Bupati dalam Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan Pembangunan daerah.

Rencana pembangunan disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: *“Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.”* Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 diarahkan untuk *“Penyiapan penguatan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi untuk peningkatan kualitas SDM dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan serta tata kelola pemerintahan yang adaptif”*.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja **Kecamatan Banyumas** Kab. Banyumas Tahun 2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis **Kecamatan Banyumas** Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas	Meningkatnya Kinerja Pemerintah kecamatan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan di Kabupaten Banyumas. Penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi Kecamatan Banyumas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan telah ditetapkan.

Kecamatan Banyumas mempunyai 6 program 11 kegiatan, 27 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lima kasi dan sekretariat. Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2026 yaitu Rp 3.089.802.000 dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten. Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 pada table T-C.33:

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kecamatan Banyumas

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
		KECAMATAN BANYUMAS				3.089.802.000,00				2.887.900.000,00
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.089.802.000,00				2.887.900.000,00
	7.01	KECAMATAN				3.089.802.000,00				2.887.900.000,00
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.945.227.000,00			-	2.735.675.000,00
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 dokumen	12.000.000,00			-	12.000.000,00
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	8 Laporan	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.000.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pengelolaan adminitrasi keuangan</i>			100 %	2.168.618.618,00		-	1.921.450.000,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	14 Orang/bulan	2.148.918.618,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.906.750.000,00
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	14.700.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14.700.000,00
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum</i>			100 %	166.921.902,00		-	172.425.000,00

	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	4 Paket	5.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.500.000,00
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	3 Paket	19.748.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			19.750.000,00
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	3 Paket	8.491.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.350.000,00
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	4 Paket	72.884.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			77.950.000,00
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	3 Paket	10.298.402,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.875.000,00
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	3 Laporan	45.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45.000.000,00
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000,00
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>		100 %	59.250.000,00			-	95.000.000,00
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	2 Unit	24.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25.000.000,00
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	2 Unit	19.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35.000.000,00
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	1 Unit	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35.000.000,00

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	444.496.480,00			-	443.500.000,00
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	4 Laporan	67.236.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			61.000.000,00
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	1 Laporan	18.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	12 Laporan	358.860.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			372.500.000,00
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah urusan Pemerintahan Daaerah		100 %	93.940.000,00			-	91.300.000,00

	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	9 Unit	29.050.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			26.300.000,00
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	4 Unit	14.790.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	1 Unit	50.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55.000.000,00
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				32.000.000,00			-	32.000.000,00
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan</i>		100 %	10.000.000,00			-	10.000.000,00

	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	3 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>		100 %	22.000.000,00			-	22.000.000,00
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha								
			<i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	16.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			16.000.000,00
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	3 Laporan	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6.000.000,00

3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				38.225.000,00			-	38.225.000,00
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase kegiatan pemberdayaan desa Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan</i>		100 % 100 %	38.225.000,00			-	38.225.000,00
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	4 Lembaga K emasyarakat an	18.225.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18.225.000,00
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								

			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	4 Laporan	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				47.000.000,00			-	47.000.000,00
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan</i>		100 %	47.000.000,00			-	47.000.000,00
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								

			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	3 Laporan	41.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		41.000.000,00
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	2 Laporan	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.000.000,00
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				13.000.000,00		-	13.000.000,00
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan</i>		100 %	13.000.000,00		-	13.000.000,00
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	13.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13.000.000,00

6,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				14.350.000,00			-	22.000.000,00
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Presentase Desa yang mendapatkan pendampingan</i>		100 %	14.350.000,00			-	22.000.000,00
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>		4 Dokumen	14.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			22.000.000,00
	J U M L A H					3.089.802.000,00				2.887.900.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 ditunjukkan pada lampiran matrik renja sebagai berikut:

Matrik Tahun 2026-2027
Kecamatan BANYUMAS Kabupaten Banyumas

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Kecamatan Banyumas			3.089.802.000,00				2.887.900.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.089.802.000,00				2.887.900.000,00	
	7	01				KECAMATAN			3.089.802.000,00				2.887.900.000,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	undefined undefined	2.945.227.000,00			-	2.735.675.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	12.000.000,00			-	12.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan adminitrasi keuangan	100 %	2.168.618.618,00			-	1.921.450.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.148.918.618,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.906.750.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	14.700.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14.700.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	100 %	166.921.902,00			-	172.425.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.500.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.748.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19.750.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	8.491.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8.350.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	72.884.500,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		77.950.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.298.402,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.875.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	45.000.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		45.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	59.250.000,00			-	95.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel								
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	24.750.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	19.500.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	444.496.480,00			-	443.500.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	67.236.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		61.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18.400.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	358.860.480,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		372.500.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah urusan Pemerintahan Daaerah	100 %	93.940.000,00			-	91.300.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	29.050.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26.300.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	14.790.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.100.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) Indeks Kepuasan Masyarakat	100 % 86 Indeks	32.000.000,00			-	32.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100 %	10.000.000,00			-	10.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								

						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %	22.000.000,00		-	22.000.000,00	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	38.225.000,00		-	38.225.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan	100 % 100 %	38.225.000,00		-	38.225.000,00	

	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.225.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18.225.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								

							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum	100 %	47.000.000,00			-	47.000.000,00	

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100 %	47.000.000,00			-	47.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	41.000.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		41.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	6.000.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase efektivitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100 %	13.000.000,00			-	13.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	100 %	13.000.000,00			-	13.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS

6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Penyusunan APBDes sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tepat	100 %	14.350.000,00			-	22.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang mendapatkan pendampingan	100 %	14.350.000,00			-	22.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	14.350.000,00	Kab. Banyumas, Banyumas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22.000.000,00	KECAMATAN BANYUMAS
Jumlah									3.089.802.000,00				2.887.900.000,00	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam rangka Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Banyumas Tahun 2026. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan Pembangunan pada Kecamatan Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2026, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2026 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026 dan Renstra Kecamatan Banyumas Tahun 2026-2029;
2. Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas dan seluruh stakeholder Pembangunan termasuk Masyarakat dan dunia usaha mempunyai peran dalam pelaksanaan Pembangunan serta dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan serta dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya;
3. Rencana Kerja Kecamatan Banyumas menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026;
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2026 mampu mendorong terwujudnya cita-cita Pembangunan Kabupaten Banyumas

Banyumas, 19 Agustus 2025

CAMAT BANYUMAS

KABUPATEN BANYUMAS



TISAM, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP 197907251997111001